

**Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal
(Suatu Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera
Utara)**

Jimmy Arnold Kila¹

Ventje Kasenda²

Gustaf Undap³

Email Korespondensi: jimmykila@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pelestarian Budaya Lokal. Halmahera utara adalah salah satu kabupaten di semenanjung utara pulau Halmahera yang berada di provinsi Maluku utara. Disana terdapat beragam budaya serta nilai-nilai kearifan lokal yang masih dijaga kelestariannya hingga saat ini. Namun seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada ancaman besar yang harus diantisipasi sedini mungkin untuk menjaga pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal yang menjadi bagian dari budaya orang halmahera utara menjadikan itu sebagai sebuah penyanggah kehidupan bermasyarakat baik itu sifatnya seremonial (perayaan ritual agama-adat) ataupun penerapan norma-norma adat (nilai) yang mengikat perilaku dalam bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam Optimalisasi pemerintah daerah dalam pelestarian budaya di Kabupaten Halmahera Utara belum maksimal, perkembangan budaya di daerah seperti bahasa, tarian dan juga kegiatan gotong royong tidak terlihat berkembang karena tidak adanya kegiatan budaya yang mengembangkan citra daerah dan dikenal masyarakat, Peran sebagai Dinamisator dari Pemerintah Daerah Khususnya dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Halmahera utara dalam pelestarian belum terlihat di masyarakat

Kata kunci: Optimalisasi, Peran, Pemerintah, Pelestarian, Budaya Lokal

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Halmahera utara diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah dan Non formal serta Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Jika ditelaah lebih jauh terkait dengan rencana strategi (Renstra) dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten halmahera utara, pada tujuan ke 6 menyebutkan meningkatnya kebudayaan dan sejarah baik lokal maupun nasional untuk mempertahankan kelestarian budaya lokal daerah untuk mendukung terwujudnya pendidikan berkarakter budaya yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian. Namun pada capaian renstra dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten halmahera utara tahun 2021 hanya mencapai target hanya 57.89%. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya keberpihakan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Halmahera utara dalam melestarikan kebudayaan lokal.

Pada kondisi aktual, dapat dilihat bahwa lembaga-lembaga adat atau pemerintahan adat sebagai produk budaya lokal yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat relative tidak lagi berfungsi atau tidak difungsikan lagi sebagaimana yang telah diatur. Lembaga adat di beberapa wilayah telah bekerjasama dengan korporasi tambang untuk menjaga keamanan wilayah adat. Padahal, wilayah adat seharusnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat bukan korporasi.

Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait perlu memperhatikan dan menerapkan strategi tersendiri untuk pengembangan dan pelestarian daerah yang menjadi identitas daerah, sesuai dengan kewenangan desentralisasi yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, melalui penataan

daerah yang ditunjukkan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Peran strategis ini dapat diwujudkan dengan membuat suatu kebijakan pembentukan-pembentukan lembaga adat dimasing-masing desa atau kecamatan, memasukkan muatan kurikulum lokal bahasa dan budaya daerah bagi anak peserta didik di masing-masing jenjang pendidikan sekolah, penggunaan bahasa daerah pada hari-hari tertentu yang dapat dimulai pada lingkungan pemerintahan dan sekolah. Disamping itu diperlukan pula upaya konkrit untuk dapat mengembangkan dan pelestarian budaya Halmahera utara melalui harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif daerah dalam membuat legalitas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tentang pelestarian budaya.

Penggunaan bahasa lokal yang memperlihatkan identitas kelompok masyarakat pendukung suatu kebudayaan cenderung tidak lagi digunakan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu (Melayu Ternate atau Melayu Ambon) atau bahasa "Melayu Pasar" yang digunakan sebagai bahasa komunikasi atau bahasa pergaulan. Bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintah atau disekolah-sekolah, juga di tempat-tempat ibadah dan bahasa lokal digunakan hanya pada waktu upacara-upacara adat/tradisional. (bagaimana dengan bahasa Tobelo, Galela, Tobaru, Kao, yang lama kelamaan tidak lagi dipraktekan, dan sebagainya).

Dalam pelestarian budaya local tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah daerah yakni dinas terkait di Kabupaten Halmahera Utara yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat serta menjalankan program yang mendukung pelestarian budaya local seperti memasukkan kurikulum budaya local, membuat kegiatan budaya local seperti lomba-lomba bahasa daerah dan tarian daerah. Namun sejauh ini dampak dari program-program tersebut belum optimal.

Dari pengamatan peneliti dilapangan mengenai peran dari pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara belum optimal, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan dilapangan dimana tergerusnya penggunaan bahasa daerah, serta budaya-budaya local lainnya hanya pada momen-momen tertentu saja.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk bahan pertimbangan dan pembeda dalam penelitian ini. Peneletian tentang Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal sudah dilakukan peneliti peneliti sebelumnya.

1. Balida, Fridolin Wisora (2015) melakukan penelitian skripsi dengan judul "Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Menjaga Eksistensi Nilai Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara". Dalam penelitian ini mengkaji terkait dengan Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara dalam menjaga eksistensi nilai kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara. Peneltian ini berjuan untuk menilai kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara dalam menjaga eksistensi nilai kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan lima indikator kinerja untuk menilai kinerja dari dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Halmahera utara yaitu produktifitas, responsibilitas, responsivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas, belum sesuai dengan peraturan bupati No 6 tahun 2011 yang mengatur tentang tupoksi dari dinas pariwisata dan kebudayaan dimana tugasnya adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan.

- Rekomendasi untuk stakeholder adalah agar Untuk meningkatkan kinerja dari DISPARBUD Halmahera Utara, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat serta semua tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk saling memberikan masukan terhadap instansi ini supaya mereka bisa bekerja lebih baik lagi. DISPARBUD kabupaten Halmahera Utara, harus lebih meningkatkan sosialisasi program disetiap lembaga-lembaga pendidikan serta masyarakat didaerah perkotaan agar nilai-nilai budaya yang ada di Halmahera Utara tidak terkikis akibat arus modernisasi, serta benar-benar mengimpelmentasikan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari DISPARBUD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPARBUD harus bekerja sama dengan instansi terkait, serta melibatkan kepala-kepala desa yang ada di kabupaten Halmahera utara. Sosialisasi budaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini DISPARBUD bekerja sama dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat di setiap kesempatan.
2. Hendriawan, Erry dan Pandikar, Ernandia (2021) melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Masyarakat (Studi Deskriptif Tentang Gua Pawon)". Dalam peneletian ini mengkaji terkait dengan Peran Pemerintah Desa Gunung Masigit dalam menjaga kearifan lokal yang ada di Gua Pawon Kecamatan Ciputat, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil wawancara menyebutkan bahwa Pemerintah Desa kurang optimal dalam mengelola nilai-nilai kearifan lokal Gua Pawon yang tidak melibatkan masyarakat dalam semua kegiatannya dan mengakibatkan

masyarakat tidak terlalu memprioritaskan Gua pawon yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang sangat berharga untuk Bangsa dan Negara.

3. Perbawasari, Susie dkk (2019). Melakukan penelitian dengan judul "Peran stakeholders dalam membangun identitas Purwakarta yang berwawasan nilai budaya lokal". Dalam penelitian ini mengkaji terkait dengan peran stakeholders dalam membangun daerah Purwakarta yang berwawasan nilai budaya Sunda yang dapat menjadi identitas daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kabupaten Purwakarta sangat dominan dalam mengembangkan proses pembangunan yang berwawasan nilai budaya Sunda terutama semenjak kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi. Akhirnya, adanya sinergis antar stakeholders di Purwakarta telah memberikan dampak yang baik bagi keterkenalan pembangunan Purwakarta sebagai salah satu kabupaten yang memiliki identitas dan menjadi tujuan destinasi wisata baru di Jawa Barat

Dari penelitian terdahulu di atas, penulis menemukan adanya beberapa persamaan antara lain, metode dan objek penelitian yang dipilih. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada lokus dan fokus penelitiannya. Dimana penulis akan melakukan penelitian di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dan menjadi fokus adalah Pelestarian Kebudayaan Lokal Halmahera utara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal Halmahera Utara dengan menggunakan pendekatan konsep dari Iyas Yusuf (2014:05) tentang

Peran pemerintah diantaranya terbagi atas:

- a) Peran Pemerintah sebagai Regulator
- b) Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator
- c) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun dan memilih mana yang penting, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi data yang sudah dikumpulkan dan sudah diklasifikasikan secara sistematis dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu: menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan..

Pembahasan

Dalam penelitian ini, pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan kebiasaan selaku pihak yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengembangkan budaya local Halmahera belum mampu menjalankan komitmen tersebut. Hal tersebut terlihat dari informasi yang didapatkan oleh peneliti terkait pengembangan dan pelestarian budaya oleh pemerintahan daerah.

Para informan yang berkompeten dibidangnya mengaku bahwa pengelolaan pelestarian budaya oleh pemerintah daerah Halmahera utara masih belum mengalami perkembangan sejak pandemic covid-19. Pada saat pandemic covid-19 pelestarian budaya mengalami kemunduran yang cukup signifikan dimana tidak ada pertemuan budaya dan pertemuan lainnya yang melibatkan banyak orang. Pelibatan banyak orang

sangat diperlukan dalam pelestarian budaya di Halmahera utara. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi malas dan menjadi acuh dan tak acuh dengan perkembangan budaya. Sebaliknya perkembangan budaya asing semakin berkembang karena kondisi tersebut kebanyakan masyarakat hanya mendapatkn hidubran melalui televise dan juga gadget mereka.

Persentase Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat diukur menggunakan jumlah kelompok masyarakat yang aktif/berjalan dalam pemajuan kebudayaan daerah terhadap jumlah kelompok masyarakat seluruhnya yang terlibat dalam pemajuan kebudayaan daerah. Dalam tahun 2021 indikator ini dapat terukur dengan realisasi sebesar 84.62% dari target yang ditentukan sebesar 100%, dengan capaian sebesar 84.62%, pencapaian ini terlihat bahwa target yang ditentukan belum dapat dicapai, dikarenakan hasil pengukuran ini terlihat menurun. Penurunan capaian ini disebabkan pada jumlah kelompok yang sebelumnya tercatat sebanyak 13 kelompok masyarakat yang aktif dalam pemajuan kebudayaan daerah dan sekarang dari hasil verifikasi ulang hanya tinggal 11 yang aktif.

Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan dilapangan, adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan daerah melalui program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2022 terdiri dari:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
 - Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 361.970.000, dan terealisasi sebesar Rp. 202.175.000 atau 55.85%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 84.62% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 55.85%, diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran ini sebesar 151.51%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan Sangat Efisien namun disisi lain anggaran tersebut tergolong sedikit untuk sebuah pelestarian dan pengembangan budaya di kabupaten Halmahera utara.

Penutup Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam Optimalisasi pemerintah daerah dalam pelestarian budaya di Kabupaten Halmahera Utara belum maksimal, perkembangan budaya didaerah seperti bahasa, tarian dan juga kegiatan gotong royong tidak terlihat berkembang karena tidak adanya kegiatan budaya yang mengembangkan citra daerah dan dikenal masyarakat, selama ini pelestarian budaya hanya bersifat parsial saja dan juga hanya beberapa orang saja yang konsen dalam dunia seni dan budaya local. Hal ini dikarenakan lemahnya regulasi yang dibuat sehingga tidak mendukung pelestarian budaya.
2. Peran sebagai Dinamisator dari Pemerintah Daerah Khususnya dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Halmahera utara dalam pelestarian belum terlihat di masyarakat, focus kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan hanya seputar sekolah hal tersebut terlihat dari pagu anggaran yang sedikit untuk pengembangan dan pelestarian budaya di kabupaten Halmahera utara.
3. Covid-19 menjadi salah satu pemicu turunnya minat masyarakat akan budaya serta kebiasaan yang sudah tidak lagi berkumpul dengan banyak

orang menjadi sebuah hal yang biasa. Ditambah lagi tidak adanya program yang menunjang pelestarian budaya dari pemerintah daerah.

Saran

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Halmahera Utara, sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi nilai-nilai kebudayaan disetiap lembaga-lembaga pendidikan serta masyarakat didaerah perkotaan agar nilai-nilai budaya yang ada di Halmahera Utara tidak terkikis akibat arus modernisasi, serta benar-benar mengimpelmentasikan visi dan misi dan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari dinas pendidikan dan kebudayaan.
2. Agar dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan budaya di kabupaten Halmahera utara, pemerintah harus bekerja sama dengan instansi terkait, serta melibatkan kepala-kepala desa yang ada di kabupaten Halmahera utara dan juga pegiat seni dan budaya di daerah.
3. Pentingnya membuat lembaga-lembaga adat di daerah yang membantu pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan budaya local di kabupaten Halmahera utara.

Daftar Pustaka

- Arimbi, Achmad Santosa , 2008, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- A Muri Yusuf. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama). Jakarta: Renika Cipta.
- A, Chaedar. Alwasilah. (2006). Pokoknya Sunda. Bandung: Karawitan
- Apter, David. 1977. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: LP3ES.
- Asy'arie, Musa. 2004. Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/1246546>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2011.
- Duverger, Maurice. Sosiologi Politik. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2005.
- Kanfer Ruth. Ackerman, Philip L., 2009. Test Length and Cognitive Fatigue: An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction. *Journal of Experimental Psychology*, 15(2): 163-181.
- Peursen, van. 1988. Strategi Kebudayaan. Edisi Kedua. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Pitana, & Diarta, (2003) . Pengantar Ilmu Pariwisata Sudayat , Ridwan Iskandar S.E , Fungsi dan Tujuan Promosi (Jakarta , 1998)
- Raga Maran, Rafael. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Rineka Cipta Indonesia
- Ranjabar, Jacobus. (2006). Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar. Bogor: PT. Ghalia Indonesia
- Sayre, W.S, dalam Inu Kencana Syafiiie, Ekologi Pemerintahan, PT. Pertja, Jakarta, 1998
- Siagian.Sondang P. 2012.Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada)
- Sugiyono, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta
- _____ Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syamsir, Torang, 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta.

Wulansari, Dewi. 2009. Sosiologi (Konsep dan Teori). Bandung: PT Refika

Aditama.

Jurnal:

BALIDA, Fridolin Wisora. Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Menjaga Eksistensi Nilai Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara¹. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 1.7: 1125.

HENDRIAWAN, Erry; PANDIKAR, Ernandia. OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA GUNUNG MASIGIT KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP MASYARAKAT (STUDI DESKRIPTIF TENTANG GUA PAWON). SANDHYAKALA Jurnal Pendidikan Sejarah, Sosial dan Budaya, 2021, 2.1: 104-123.

PERBAWASARI, Susie; DIDA, Susanne; NUGRAHA, Aat Ruchiat. Peran stakeholders dalam membangun identitas Purwakarta yang berwawasan nilai budaya lokal. Profesi Humas, 2019, 4.1: 23-46.

Ponamon, I. F. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 9(2), 68-80.

Sumber lainnya:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016-2021